



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Bimo Aji Prayoga¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Majalengka dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun Kabupaten Majalengka telah meraih indeks SPBE sebesar 2,94 dengan predikat "Baik" pada tahun 2024, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan teknis dan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah berjalan secara formal namun masih terkendala kejelasan teknis di tingkat pelaksana. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM IT menjadi hambatan utama. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan adanya tantangan pada budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya beralih dari pola manual ke digital. Dari sisi struktur birokrasi, ego sektoral antar instansi masih menghambat integrasi data yang menyeluruh. Kesimpulannya, implementasi SPBE di Kabupaten Majalengka telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi, namun diperlukan penguatan pada kemandirian infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, serta sinkronisasi kebijakan antar unit kerja untuk mencapai *good governance* yang optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SPBE, *Good Governance*, Kabupaten Majalengka.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) policy in Majalengka Regency in an effort to realize good governance. Although Majalengka Regency achieved an SPBE index of 2.94 with a "Good" predicate in 2024, various technical and structural obstacles are still found in practice. This study uses a descriptive qualitative approach with George C. Edward III's policy implementation framework, which covers four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the communication dimension has been formally established but remains constrained by technical clarity at the implementation level. In the resource dimension, the limited quantity and quality of IT human resources constitute a major obstacle. Meanwhile, the disposition dimension reveals challenges in the work culture of officials who have not fully transitioned from manual to digital patterns. From the bureaucratic structure

perspective, sectoral ego between agencies still hinders comprehensive data integration. In conclusion, the implementation of SPBE in Majalengka Regency has had a positive impact on transparency and efficiency, but strengthening regional infrastructure independence, increasing human resource competence, and synchronizing policies between work units are required to achieve optimal good governance.

Keywords: Policy Implementation, SPBE, Good Governance, Majalengka Regency.

PENDAHULUAN

Pemerintahan modern saat ini tengah berada dalam masa transisi besar dari model birokrasi konvensional menuju tata kelola digital. Di Indonesia, transformasi ini secara yuridis dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SPBE menjadi pilar utama dalam mewujudkan konsep *Good Governance*. Dengan teknologi informasi, celah korupsi dapat diminimalisir melalui sistem yang terintegrasi, serta pelayanan publik dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini sangat krusial bagi negara kepulauan yang memiliki kompleksitas birokrasi tinggi, di mana efisiensi menjadi barang mahal yang harus diperjuangkan melalui inovasi teknologi.

Provinsi Jawa Barat sering kali dijadikan *role model* dalam implementasi digitalisasi pemerintahan. Namun, keberhasilan di tingkat provinsi tidak serta merta mencerminkan kondisi yang seragam di seluruh kabupaten/kota di bawahnya. Terdapat kesenjangan digital yang cukup nyata antara daerah perkotaan dengan kabupaten yang sedang berkembang, salah satunya adalah Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Majalengka saat ini tengah berupaya keras menyelaraskan langkah dengan visi Jawa Barat sebagai "Provinsi Digital". Berdasarkan data evaluasi SPBE, Kabupaten Majalengka mencatatkan indeks sebesar 2,94 dengan predikat "Baik" pada tahun 2024. Meskipun secara angka menunjukkan progres, pencapaian ini masih menyisakan banyak catatan kritis terkait integrasi sistem dan pemanfaatan data yang belum maksimal.

Masalah utama yang muncul ke permukaan adalah belum terciptanya konektivitas yang utuh antar instansi atau Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Sering kali, ego sektoral masih menjadi penghambat di mana setiap instansi memiliki aplikasi masing-masing yang tidak saling "berbicara". Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengunggah data yang sama berulang kali pada platform yang berbeda, yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi.

Selain masalah teknis, kendala sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan yang sangat fundamental. Transformasi digital memerlukan aparatur yang memiliki literasi teknologi yang mumpuni. Di Kabupaten Majalengka, terdapat kesenjangan kompetensi IT antara generasi senior dan junior, yang berdampak pada kecepatan adaptasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terus diperbarui.

Aspek partisipasi publik juga menjadi bagian dari latar belakang penelitian ini. *Good Governance* menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Sejauh mana platform digital yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat pedesaan menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan SPBE di lapangan.

Melalui identifikasi awal, ditemukan bahwa implementasi SPBE di Majalengka masih bersifat administratif ketimbang transformatif. Artinya, sistem baru sebatas memindahkan proses manual ke layar komputer, namun belum mengubah budaya kerja birokrasi secara mendasar. Inilah yang mendasari urgensi untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan ini melalui kacamata teori implementasi kebijakan.

Berdasarkan realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengupas secara tuntas bagaimana implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Majalengka berjalan. Dengan menggunakan model George C. Edward III, penelitian ini mencoba melihat sejauh mana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berkelindan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Majalengka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena implementasi SPBE. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam

dengan narasumber kunci di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, serta observasi pada pusat layanan publik. Analisis data dilakukan secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan realitas empiris di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Majalengka merupakan sebuah manifestasi dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi di era digital. Sebagai instrumen utama dalam mewujudkan *Good Governance*, keberhasilan SPBE tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang dimiliki, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah tata kelola yang kaku menjadi lebih dinamis, transparan, dan akuntabel. Kabupaten Majalengka, dengan segala dinamika wilayahnya, menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji bagaimana sebuah kebijakan transformasi digital berhadapan dengan realitas struktur birokrasi dan budaya kerja lokal.

Dalam menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Penggunaan teori ini bertujuan untuk membedah secara mendalam faktor-faktor krusial yang saling berinteraksi di lapangan. Pembahasan berikut akan mengurai satu demi satu dimensi utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk melihat sejauh mana keselarasan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Majalengka. Melalui analisis mendalam pada setiap dimensi ini, akan terpotret tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Dimensi Komunikasi

Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Majalengka sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antar-stakeholder. Dalam proses transmisi informasi, Diskominfo selaku *leading sector* telah berupaya menyebarluaskan regulasi melalui jalur birokrasi formal. Namun, pola komunikasi yang cenderung

bersifat *top-down* ini sering kali menghadapi hambatan di mana informasi hanya berhenti di level manajerial atau Kepala OPD, sehingga staf teknis yang menjadi ujung tombak pelaksana sering kali mengalami keterlambatan informasi mengenai pembaruan sistem.

Kejelasan pesan dalam komunikasi kebijakan juga menjadi catatan krusial. Peneliti menemukan bahwa instruksi teknis mengenai integrasi data antar-aplikasi masih sering dianggap terlalu rumit dan sulit dipahami oleh OPD yang tidak memiliki latar belakang IT. Ketidakmampuan menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa operasional birokrasi menyebabkan banyak instansi merasa enggan untuk melakukan sinkronisasi data secara mandiri, yang pada akhirnya menghambat terciptanya sistem informasi yang terpadu.

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan menjadi faktor yang menentukan kepercayaan para pelaksana di lapangan. Dinamika perubahan platform aplikasi, baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan internal daerah, sering kali tidak dibarengi dengan penyampaian informasi yang cepat dan searah. Ketidakkonsistenan ini menciptakan kebingungan, terutama bagi operator di unit pelayanan seperti Dinas PMPTSP, yang harus beradaptasi dengan cepat agar tidak mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, koordinasi komunikasi antar-lembaga dalam Tim Koordinasi SPBE masih perlu diperkuat fungsinya. Komunikasi yang terjalin saat ini masih bersifat formalitas administratif melalui surat-menyurat atau rapat koordinasi berkala yang minim tindak lanjut teknis. Diperlukan saluran komunikasi yang lebih cair dan responsif, misalnya melalui forum teknis khusus, agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera didiskusikan dan dicarikan solusinya secara kolektif tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

Aspek sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna akhir layanan juga menjadi bagian dari dimensi komunikasi ini. Meskipun infrastruktur digital telah dibangun, efektivitasnya akan rendah jika masyarakat tidak mengetahui cara mengaksesnya. Peneliti melihat bahwa upaya pemerintah dalam mengomunikasikan manfaat dan cara penggunaan aplikasi layanan

publik digital kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah pedesaan Majalengka, masih perlu dioptimalkan agar asas kemanfaatan dari kebijakan SPBE ini benar-benar dirasakan secara merata.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terpenting sekaligus tantangan terbesar di Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan SPBE. Ketersediaan aparatur dengan kompetensi pranata komputer atau ahli IT masih sangat jauh dari angka ideal dibandingkan dengan beban transformasi digital yang masif. Hal ini menyebabkan penumpukan beban kerja pada segelintir personel teknis di Diskominfo, sementara di OPD lain, pengelolaan sistem digital sering kali diserahkan kepada staf yang tidak memiliki latar belakang keahlian yang relevan.

Selain keterbatasan jumlah, ketergantungan pada tenaga kontrak atau konsultan luar menjadi risiko strategis bagi kemandirian digital daerah. Pengelolaan infrastruktur yang sangat penting bagi pemerintahan seharusnya dijalankan oleh ASN yang memiliki komitmen jangka panjang. Tanpa adanya strategi pengembangan kapasitas dan rekrutmen tenaga ahli yang sistematis, keberlanjutan sistem informasi di Majalengka akan terus berada dalam posisi rentan, terutama saat terjadi pergantian personel teknis yang membawa pengetahuan spesifik sistem tersebut.

Dari sisi sumber daya finansial, alokasi anggaran untuk mendukung SPBE sudah mulai menunjukkan tren positif di APBD Kabupaten Majalengka. Namun, struktur anggaran saat ini masih didominasi oleh belanja modal untuk perangkat keras dan biaya langganan internet. Alokasi untuk "sumber daya lunak" seperti pelatihan kompetensi digital bagi aparatur dan penguatan sistem keamanan siber masih mendapatkan porsi yang minim, padahal aspek keamanan data adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Terkait sumber daya fasilitas, keberadaan *Command Center* dan pusat data lokal di Majalengka merupakan kemajuan besar. Namun, peneliti menggarisbawahi tantangan ketergantungan pada infrastruktur pusat (Pusat Data Nasional). Kejadian gangguan sistem di tingkat pusat sering kali melumpuhkan layanan di daerah tanpa ada sistem cadangan (*backup*) lokal

yang mumpuni. Hal ini menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut pada kemandirian infrastruktur daerah yang mampu tetap beroperasi secara mandiri dalam situasi darurat.

Dimensi sumber daya juga mencakup aspek wewenang atau otoritas dalam pengambilan keputusan. Diskominfo Kabupaten Majalengka sering kali berada dalam posisi dilematis; di satu sisi mereka bertanggung jawab atas standar teknis seluruh aplikasi, namun di sisi lain mereka tidak memiliki otoritas kuat untuk mengintervensi OPD yang membangun sistem sendiri secara *silo*. Diperlukan penguatan dasar hukum, seperti Peraturan Bupati yang memberikan wewenang penuh kepada Tim Koordinasi SPBE untuk melakukan audit dan standardisasi teknologi di seluruh unit kerja pemerintahan.

3. Dimensi Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana di Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan respons yang cukup terbuka terhadap digitalisasi, namun masih terjebak dalam level kepatuhan simbolis. Sebagian besar aparatur memandang implementasi SPBE sebagai tuntutan pemenuhan nilai indeks dari pemerintah pusat, bukan sebagai kebutuhan mendasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Akibatnya, motivasi untuk melakukan inovasi digital sering kali hanya muncul menjelang masa evaluasi tahunan, bukan menjadi semangat kerja harian.

Budaya kerja konvensional yang mengandalkan dokumen fisik (kertas) masih sangat kuat di kalangan birokrasi Majalengka. Fenomena "dualisme kerja" di mana pegawai memasukkan data ke sistem digital namun tetap mewajibkan adanya berkas fisik menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap keandalan sistem. Perubahan perilaku dari budaya analog ke digital memerlukan waktu dan keteladanan dari pimpinan, karena tanpa perubahan pola pikir (*mindset*), teknologi tercanggih sekalipun hanya akan menjadi beban tambahan bagi staf.

Resistensi terhadap perubahan sering kali muncul secara pasif, terutama dari kalangan pejabat senior yang kurang akrab dengan teknologi informasi. Hal ini menciptakan ketimpangan beban kerja, di mana tugas-tugas administratif digital selalu dilimpahkan kepada staf yang lebih muda

atau tenaga kontrak. Jika tidak segera diatasi melalui edukasi yang inklusif, gap literasi ini akan menghambat percepatan *Good Governance* karena proses pengambilan keputusan strategis masih sering terhambat oleh lambatnya adaptasi teknologi di level manajerial.

Masalah motivasi juga dipengaruhi oleh belum adanya skema penghargaan (*reward*) yang jelas bagi inovator digital di lingkungan pemerintahan daerah. Saat ini, OPD yang berhasil melakukan transformasi digital dengan cepat tidak mendapatkan insentif anggaran atau apresiasi khusus, sementara yang lambat pun tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan dorongan untuk melakukan perbaikan layanan secara mandiri menjadi lemah, karena pelaksana merasa tidak ada perbedaan antara berprestasi atau sekadar bekerja rutin.

Oleh karena itu, penguatan disposisi memerlukan kepemimpinan digital yang kuat dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Komitmen pimpinan untuk menggunakan data digital dalam rapat-rapat koordinasi dan pengambilan keputusan akan memaksa aparatur di bawahnya untuk ikut beradaptasi. Hanya dengan tekanan dan dukungan dari pimpinan tertinggi, sikap skeptis terhadap SPBE dapat diubah menjadi semangat kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif di Kabupaten Majalengka.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Kabupaten Majalengka dalam mendukung SPBE telah memiliki kerangka formal melalui Tim Koordinasi SPBE, namun masih menghadapi tantangan fragmentasi organisasi yang akut. Banyak OPD masih bekerja dengan paradigma "pulau aplikasi", di mana setiap dinas membangun sistem informasinya sendiri tanpa koordinasi awal dengan Diskominfo. Fragmentasi ini tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran karena aplikasi yang tumpang tindih, tetapi juga menyulitkan proses integrasi data lintas sektor.

Aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) juga memerlukan penyesuaian besar. Banyak SOP layanan publik di Majalengka saat ini hanyalah proses manual yang dipindahkan ke platform digital tanpa adanya penyederhanaan birokrasi. Akibatnya, durasi pelayanan terkadang tidak

menjadi lebih cepat secara signifikan karena langkah-langkah administratif yang seharusnya bisa dipangkas melalui sistem otomatis, tetap dipertahankan demi alasan formalitas birokrasi lama.

Koordinasi antarunit di dalam struktur pemerintahan daerah masih sering terhambat oleh ego sektoral. Tim Koordinasi SPBE seharusnya menjadi jembatan yang meruntuhkan sekat antar dinas, namun dalam praktiknya, ego masing-masing dinas dalam menguasai datanya sendiri masih sangat tinggi. Tanpa adanya keterbukaan data antar instansi, visi besar mengenai portal satu data Kabupaten Majalengka akan sulit terwujud, dan masyarakat tetap akan dibebankan oleh prosedur pengulangan input data di berbagai aplikasi berbeda.

Interoperabilitas sistem menjadi target jangka panjang yang harus dijawab oleh struktur birokrasi digital Majalengka. Saat ini, struktur yang ada belum mendukung aliran data yang otomatis dan antar OPD. Diperlukan sebuah arsitektur SPBE daerah yang mampu menyatukan berbagai kepentingan instansi ke dalam satu standar teknis yang sama. Jika struktur birokrasi mampu memfasilitasi pertukaran data secara aman dan cepat, maka akuntabilitas pemerintahan akan meningkat secara otomatis seiring dengan transparansi data yang dihasilkan.

Efektivitas struktur birokrasi sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten. Struktur yang sudah ada harus dilengkapi dengan fungsi audit teknologi informasi secara berkala untuk memastikan setiap aplikasi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan struktur yang solid dan fungsi pengawasan yang berjalan, implementasi SPBE di Kabupaten Majalengka tidak hanya akan berhenti pada pencapaian predikat "Baik", tetapi benar-benar bertransformasi menjadi tulang punggung terwujudnya *Good Governance* yang sejati.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Majalengka telah menunjukkan kemajuan bermakna secara administratif, namun masih memerlukan penguatan pada sisi substansi dan integrasi. Keberhasilan mencapai predikat "Baik" dalam indeks SPBE nasional menjadi modal awal

yang kuat, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan teknis dan budaya kerja di lapangan yang memerlukan penyelesaian segera.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan melalui jalur formal, tetapi kejelasan teknis di tingkat pelaksana terbawah masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi mispersepsi. Sosialisasi yang lebih masif hingga ke tingkat masyarakat sangat diperlukan agar sistem yang sudah dibangun tidak menjadi mubazir karena kurangnya pengguna. Ketersediaan sumber daya, terutama SDM ahli di bidang teknologi informasi, merupakan tantangan mendesak yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Ketergantungan pada tenaga luar atau konsultan harus mulai dikurangi dengan membangun kapasitas internal aparatur melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan tersertifikasi.

Aspek infrastruktur memerlukan investasi yang lebih terarah pada keamanan siber dan pemeliharaan sistem. Pembangunan fisik tidak akan berarti banyak jika sistem yang ada sering mengalami gangguan atau rentan terhadap serangan pihak luar. Oleh karena itu, penguatan Pusat Data Daerah yang tangguh harus menjadi prioritas dalam rencana strategis ke depan. Disposisi atau sikap aparatur perlu diarahkan dari sekadar menjalankan kewajiban menjadi budaya inovasi digital. Diperlukan perubahan pola pikir agar teknologi informasi dipandang sebagai alat bantu yang memudahkan, bukan beban tambahan. Pemberian insentif dan *reward* bagi unit kerja yang inovatif bisa menjadi salah satu solusi untuk memotivasi perubahan perilaku ini.

Struktur birokrasi melalui Tim Koordinasi SPBE harus berfungsi lebih aktif sebagai jembatan antar-OPD untuk menghilangkan ego sektoral. Koordinasi yang kuat akan memastikan bahwa setiap aplikasi yang dibangun memiliki satu standar yang sama dan mampu berintegrasi ke dalam sistem portal data tunggal Kabupaten Majalengka. Dalam mewujudkan *Good Governance*, SPBE di Majalengka telah memberikan dampak positif pada transparansi dan pengurangan potensi korupsi.

Namun, kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok desa, tetap harus menjadi perhatian utama agar keadilan digital dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

Implementasi SPBE bukan sekadar tentang pengadaan komputer, melainkan tentang transformasi cara memerintah ke arah yang lebih terbuka dan melayani. Komitmen pimpinan daerah menjadi variabel kunci yang akan menentukan apakah digitalisasi ini akan terus melaju menuju kesempurnaan atau sekadar menjadi tren administratif sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A. A. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi lampung dengan prinsip Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Khairudin, S. &. (2021). Protet Kepercayaan Publik Good Governance, dan E-Government di Indonesia. Bandarlampung: CV. Amerta Media.
- Mareta Y, A. F. (2025). Implementasi Tantangan dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Wahyudi, F. A. (2025). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Administrasi Pemerintah Desa*.